



Nilai-nilai *Sapta Bayu* sebagai Katalisator *Good Governance*: Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pengempon Pura di Bali

Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida^{1*}, I Gusti Agung Prama Yoga² 

¹ Prodi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2025-02-02

Revised: 2025-03-16

Accepted: 2025-05-01

Available Online: 2025-06-25

Kata Kunci:

Akuntabilitas; Akuntabilitas Organisasi Keagamaan; Akuntansi Lembaga Sosial; Tata Kelola Sektor Publik; *Sapta Bayu*,

Keywords:

Accountability; Accountability of Religious Organizations; Accounting Social Institutions; Public Sector Governance, *Sapta Bayu*

DOI:

<https://doi.org/10.38043/jiab.v10i1.6926>

menekankan pentingnya kejujuran, kebenaran, kemitraan, dan pengelolaan ekonomi yang adil dalam mewujudkan *good governance* di pura.

ABSTRAK

Prinsip *good governance* menjadi fondasi utama dalam pengelolaan institusi sosial termasuk Pura sebagai wadah spiritual. Mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Namun, penerapannya sering menghadapi tantangan dalam adaptasi nilai budaya setempat. Nilai-nilai kepemimpinan *Sapta Bayu* yang diwariskan Sri Ksari Warmadewa, diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif, terpercaya, dan berkelanjutan. Tata kelola Pura masih menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan sektor publik dapat lebih selaras bila implementasinya memperhatikan budaya dan nilai masyarakat lokal dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Integrasi *Sapta Bayu*, dapat memberikan Solusi berbasis budaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pura. Penelitian bertujuan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai *Sapta Bayu* dapat diintegrasikan dengan prinsip *good governance* dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasi tata kelola. Serta menengahi kesenjangan antara nilai budaya dan sistem administrasi modern. Integrasi *Sapta Bayu*, diharapkan menjadi harmonisasi antara regulasi formal dan praktik akuntansi sosial berbasis budaya. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif naratif studi kasus di Bali, data bersumber dari wawancara mendalam dan observasi lapangan. Kesimpulannya pengelolaan pura di Bali dinilai cukup baik, meski ada tantangan transparansi dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan pura sangat bergantung pada bentuk sistem: sistem internal oleh pengempon atau akuntabilitas sosial untuk pura yang didanai masyarakat. Masyarakat menginginkan integrasi manajemen modern dengan nilai adat seperti *Sapta Bayu*, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini

ABSTRACT

The principle of *good governance* is the main foundation in the management of social institutions, including the temple as a spiritual forum. Includes aspects of transparency, accountability, participation, and effectiveness of resource management. However, its implementation often faces challenges in adapting local cultural values. The leadership values of *Sapta Bayu*, inherited by Sri Ksari Warmadewa, are expected to be able to create a more effective, reliable, and sustainable management system. The governance of the temple still faces challenges in ensuring transparency and accountability. Public sector management can be more harmonized if its implementation pays attention to the culture and values of the local community in creating a more inclusive and responsive government. The integration of *Sapta Bayu*, can provide a culture-based solution to improve the quality of temple management. The research aims to explore how the values of *Sapta Bayu* can be integrated with the principles of *good governance* in identifying challenges and opportunities that arise in the implementation of governance. As well as mediating the gap between cultural values and the modern administrative system. The integration of *Sapta Bayu* is expected to be a harmonization between formal regulations and culture-based social accounting practices. Lack of transparency and accountability in public sector management can lead to public distrust. Using a qualitative narrative approach of a case study in Bali, the data was sourced from in-depth interviews and field observations. In conclusion, the management of temples in Bali is considered quite good, despite the challenges of transparency and community participation. The accountability of temple management is highly dependent on the form of the system: an internal system by the owner or social accountability for a community-funded temple. The community wants the integration of modern management with traditional values such as *Sapta Bayu*, which demands transparency, accountability, and public participation. This emphasizes the importance of honesty, truth, partnership, and fair economic management in realizing *good governance* in the temple.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Eksistensi keberadaan Pura tidak terlepas dari peran kerjasama masyarakat dan *pengempon* (pengurus) pura. Meski Pura merupakan situs keagamaan yang tidak berorientasi laba, namun dalam oprasionalnya memerlukan pendanaan yang bersumber dari multi sumber. Pengelolaannya memerlukan perhatian yang konsisten melibatkan logistik, pengelolaan dana dan tata kelola, (Ravichandran, et.all. 2024). Meskipun saat ini tempat ibadah mulai menyusun laporan keuangan yang transparan, seringkali keterbatasan anggaran dalam sistem menejemen membuat pelaporan sering tertunda (Nurdin, dkk. 2024). Pada konteks keagamaan, seringkali transparansi dan akuntabilitas tidak dianggap sebagai hal yang penting, terutama dalam bentuk pelaporan akuntansi (Windasari,2024). Pada masa modern kini, peran *Pemangku* tidak lagi hanya sebatas pemimpin upacara keagamaan (Hindu), namun sekaligus sebagai figur religius yang mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak internal dan eksternal pura sebagai bentuk adaptasi budaya dan spiritualitas Hindu Bali dalam konteks kelembagaan modern (Arsani, dkk. 2025).

Penerapan tata kelola keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan tempat ibadah, (Manek dkk. 2024). Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pengelola organisasi untuk menjelaskan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Laughlin 1990: Mulgan (2000). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi *stakeholder* serta sebagai pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan, (Mardiasmo,2018). Selama ini masih jarang kajian mengenai transparansi dalam pengelolaan pura, dianggap tabu karena segala bentuk sumbangan kepura dianggap *Punia* (sumbangan tulus ikhlas) yang sudah sepenuhnya diserahkan tanpa mengharapkan balasan. Meski sudah mulai ada lapiran pertanggungjawaban, namun laporan hanya merupakan ringkasan penggunaan dana. Tetapi tidak ada bukti atas penerimaan. Tapi pernahkan hal itu dipermasalahkan?.

Dalam pengelolaan nilai-nilai luhur diantaranya gotong royong, ketulusan, keikhlasan, pengabdian yang masih sangat disakralkan diarea spiritual. Jika kaitannya dengan Agama, maka validasi akan kebaikan dan kebenaran lebih dipercaya dari pada kecurangan. Namun, beberapa fenomena menunjukkan hal sebaliknya. Beberapa Kasus berikut ini:

Tabel 1. Fenomena pengelolaan dana di organisasi keagamaan.

No	Kasus kegagalan pengelolaan dana yang terjadi pada organisasi keagamaan.
1.	Korupsi Dana hibah Pembangunan Pura di Gianyar Senilai Rp 2,25 milyar, (Krista, 2024).
2.	Penyelewegan Dara Hibah di Desa adat Menjangan Senilai Rp. 2,2 Milyar, (Novi, 2024).
3.	Korupsi dara hibah Pura dalem Desa adat Tiyangan senilai 1.6 milyar, (Politika,2024).
4.	Pembangunan wantilan yang roboh pada saat di plaspas (upacara peresmian yang dilakukan diawal sebelum di gunakan setelah bangunan baru selesai), (Eka, 2024).

Sumber: data diolah, 2025.

Hal tersebut menunjukkan adanya celah penggunaan dana. Tidak hanya menekankan pada kecurangan penggunaan dana atau penyelewengan. Namun tata Kelola yang kurang baik juga dapat berakibat pada ketidak efektifan dalam pengelolaan. Pemborosan, ataupun penggunaan pada pos yang tidak seharusnya karena ketidaktahuan. Tingkat kepercayaan para pihak yang menjadi multi sumber pendanaan pura sangatlah penting. Karena untuk keberlanjutan pura, perlu biaya operasional rutin yang cukup besar. Ulfah (2018) sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan dana, para donatur biasanya mensyaratkan adanya suatu pelaporan. Hal ini dianggap penting untuk transparansi pertanggung jawaban untuk mencegah *fraud*. Tidak menutup kemungkinan adanya kasus seperti korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi dalam organisasi nirlaba keagamaan, Fitriia (2017).

Pelaporan keuangan sangat penting bagi lembaga keagamaan untuk mencerminkan kekuatan dan kemampuan keuangan. Di Malaysia, dalam pengelolaan masjid tiap kegiatan keuangan memerlukan persetujuan tertulis dari departemen agama negara. Kepatuhan terhadap peraturan negara diperlukan, tetapi metode penggalangan dana yang inovatif direkomendasikan untuk mengatasi masalah sosial sambil mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Manning and Joseph, 2019). Di Prancis, Paroki Katolik menggunakan menggunakan metode akuntansi biaya untuk memberikan kejelasan tentang aliran uang, dengan penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan tindakan ritual dan operasional. Sistem ini membantu menjelaskan dinamika keuangan dalam komunitas agama (D'Arns and Nicolas. 2006). Dibanyak negara entitas keagamaan mendapatkan dukungan dari negara. contohnya di Rumania, negara memberikan dana *public da insentif fiskal* seperti pembebasan pajak atas pendapatan dari produk dan kegiatan ekonomi tertentu karena peran yang signifikan dari komunitas religius dalam kehidupan sosial, (Bostan and Costuleanu, 2010).

Sapta Bayu berasal dari nilai-nilai kepemimpinan Sri Kesari Warmadewa, raja pertama di Bali. Istilah "Sapta Bayu" secara harfiah berarti "tujuh kekuatan" berupa abstraksi dari tujuh nilai utama yang dipegang oleh Sri Kesari Warmadewa dalam memimpin. Nilai-nilai ini meliputi nilai-nilai kepemimpinan *Sapta Bayu*, yang diwariskan dari Sri Kesari Warmadewa, mencakup Bayu Sakti (kewibawaan), Bayu Jiwa (kepedulian), Bayu Budhi (kebijaksanaan), Bayu Sabda (komunikasi jujur), Bayu Dhana (pengelolaan sumber daya), Bayu Harsa (kesejahteraan), dan Bayu Yadnya (pengabdian dan integritas). Sapta Bayu secara garis besar juga menyangkut religiusitas, penghormatan terhadap keberagaman, kebijaksanaan, inovasi, kreativitas, cinta lingkungan, dan kemandirian untuk kesejahteraan rakyat. Nilai ini sudah diterapkan oleh Universitas Warmadewa sebagai pedoman bagi sivitas akademiknya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, membangun budaya akademik, serta tata Kelola (*good governance*) di Universitas, (Raka dkk.2018). Jika nilai dari tujuh kekuatan ini dapat diimplemmentasikan dengan baik maka dapat menciptakan *good governance* di organisasi keagamaan.

Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai *Sapta Bayu* dapat berperan sebagai katalisator dalam penerapan *good governance*, berfokus pada persepsi masyarakat dan dampaknya terhadap kinerja tata kelola di lingkungan Pura. Nilai-nilai *Sapta Bayu* dapat menjadi dasar dalam membangun transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan Pura sebagai institusi sosial dan spiritual. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa Pura di Bali. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai *Sapta Bayu* dalam tata kelola Pura mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat sistem pengelolaan sumber daya yang lebih akuntabel. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi tata kelola yang modern serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi integrasi antara prinsip *good governance*, nilai-nilai Sapta Bayu, dan praktik tata kelola berbasis komunitas. Terdapat dua rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam riset ini yaitu, bagaimana persepsi masyarakat terhadap *good governance* dalam pengelolaan pura di Bali?. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi nilai Sapta Bayu sebagai katalisator *good governance* kinerja pengempon pura di Bali?.

Riset ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang sangat mendalam dan detail tentang suatu fenomena. Metode ini fokus pada konteks spesifik, sehingga kita dapat memahami secara utuh mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Metode studi kasus sangat relevan untuk penelitian eksploratif. Meski riset bertema *good governance* dalam tata kelola sektor publik telah banyak berkembang, seperti yang dilakukan oleh Widasari & Putri, 2018, Putri, 2021, Dharmikal & Subanda, 2023, ardiana et al, 2025. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi nilai-nilai kepemimpinan tradisional seperti *Sapta Bayu* dalam *good governance* sektor publik masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada regulasi formal tanpa mempertimbangkan aspek budaya dan kearifan lokal, atau Analisa yang dilakukan pada institusi pemerintahan, bukan institusi spiritual seperti Pura. Hal tersebut merupakan *state-of-the-art* dan kebaruan riset ini. Maka riset ini dapat mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menghubungkan prinsip *Sapta Bayu* dengan *good governance* dalam konteks tata kelola berbasis komunitas spiritual

2. METODE

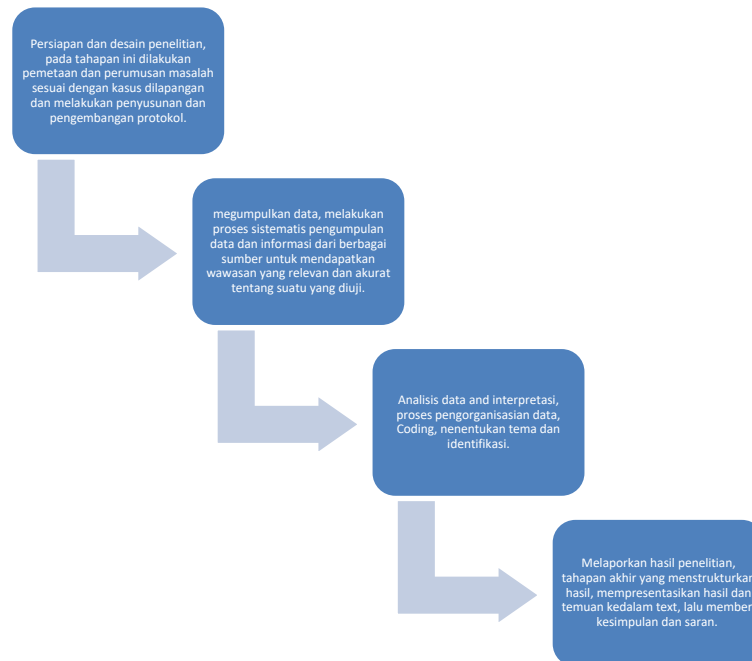
Penelitian ini diawali oleh pemerikiran yang digambarkan pada Gambar.1 berikut ini yang berisikan nilai-nilai yang terkandung dalam *good governance* dalam tata kelola organisasi yang kental dengan budaya lokal, pura dan pemetaan kendala yang dialami.



Gambar.1 Pemetaan *good governance* dan kendala yang dihadapi

Gambar.1 memberikan Gambaran pola pikir hal yang mendasari riset penelitian ini. Persepsi masyarakat terkait implementasi nilai *Sapta Bayu* dalam tata kelola sektor publik dalam riset ini, diuji dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan untuk memberikan sudut pandang mendalam untuk memahami bagaimana nilai-nilai *Sapta Bayu* diterapkan dan dimaknai dalam konteks sosial dan budaya spesifik dari suatu pura atau desa adat. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap satu atau beberapa pura sebagai unit analisis (kasus).

Informan dalam penerlitan ini dipilih berdasarkan kriteria khusus, yaitu memiliki pengetahuan dan secara aktif ikut terlibat dalam kegiatan di Pura Desa Kesiman (sembahyang, mengikuti upacara atau menjadi pengurus), berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, memiliki waktu dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 orang, 14 orang merupakan umat Hindu yang aktif ke Pura, dan 1 orang informan kunci yang merupakan pengurus pura, memiliki pemahaman mendalam tentang Sejarah dan adat Pura, berlatar belakang sarjana strata-II, Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan. Hasil yang didapatkan tidak berupa generalisasi statistik, melainkan deskripsi dan analisis yang mendalam dan terperinci tentang fenomena di lokasi penelitian yang spesifik. Tahapan metode penelitian dilakukan dalam empat tahap sebagai berikut:



Langkah-langkah diatas merupakan alur kerja dalam metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penelitian ini. Pada tahapan pengumpulan data, metode yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan sudut pandang subjektif dari informan yang memiliki pengetahuan dan mengalami atau merasakan tata kelola pura baik secara langsung maupun tidak. Pemilihan informan dilakukan dengan kriteria yang bersangkutan sudah berusia dewasa menurut hukum, memiliki pengetahuan terhadap topik yang diteliti, memiliki waktu dan bersedia memberikan informasi (sebagai informan). Sebelum menarik kesimpulan juga dilakukan triangulasi data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan, triangulasi waktu dalam beberapa periode untuk melihat konsistensi temuan.

Riset ini diharapkan dapat memberikan literasi wawasan tentang integrasi nilai-nilai kearifan lokal, khususnya Sapta Bayu, dalam konsep *good governance*. Berkontribusi tpada pengembangan literatur tentang tata kelola berbasis budaya dalam sektor publik dan sosial. Dapat memberikan gambaran mengenai persepsi Masyarakat terhadap *good governance* yang dapat dipercaya dan meningkatkan integritas pengelola instansi spiritual dan sosial. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam memberi masukan bagi para penentu kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan selama satu tahun pada 2025. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, berikut poin-poin penting yang didapat dari sudut pandang subjektif para informan. Terdapat 15 sumber informan. Informan kunci penelitian ini adalah pemilik Pesraman Lobong Sari Kusima Patra, 14 informan lainnya merupakan masyarakat Hindu di Bali yang aktif menjadi pemedek, memiliki informasi yang cukup, dan bersedia menjadi informan penelitian. Maka total informan penelitian ini Adalah 15 orang.

3.1 *Sangkep* sebagai bentuk akuntabilitas di Pura.

Secara umum, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan pura di Bali menunjukkan adanya beberapa aspek utama yang dianggap penting dan perlu diperhatikan. Persepsi ini mencakup aspek partisipasi masyarakat, transparansi, struktur organisasi, dan tanggung jawab bersama. Mayoritas responden menekankan pentingnya partisipasi seluruh warga desa atau banjar dalam pengelolaan pura. Pengelolaan pura dianggap sebagai tanggung jawab besama (Mangku, et al., 2021). Pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah atau *sangkep* (rapat) yang melibatkan semua krama (umat). Hal ini mencerminkan semangat gotong royong yang kuat sebagai landasan dalam menjaga dan mengelola tempat suci. Masyarakat merasa bahwa pengelolaan pura adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas pengurus semata. Pengambilan keputusan terkait pengelolaan pura dilakukan melalui musyawarah yang dikenal sebagai *sangkep*. Proses ini melibatkan anggota masyarakat (*krama*) sebagai wujud dari pengambilan keputusan kolektif. Partisipasi krama untuk memastikan bahwa setiap

keputusan mencerminkan kesepakatan bersama, sejalan dengan prinsip tradisional masyarakat Bali, (Lansing & Stephen, 2012).

Aspek transparansi dan keterbukaan menjadi sorotan penting. Beberapa responden menyatakan bahwa pengelolaan pura sudah berjalan secara transparan, namun ada juga yang mengindikasikan bahwa masih ada beberapa pura yang pengelolaannya kurang terbuka terhadap partisipasi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Transparansi pengelolaan dana dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pura, tetapi kompleksitasnya seringkali menimbulkan kendala dalam pelaksanaan (Cardillo & Eleonora, 2020).

Pengelolaan pura tidak hanya berfokus pada hal-hal administratif, tetapi juga mencakup aspek fisik dan spiritual. Masyarakat memandang pentingnya perawatan sarana dan prasarana, kebersihan, serta pelaksanaan upacara keagamaan yang rutin dan terorganisir. Fasilitas yang baik di pura dapat meningkatkan kesejahteraan umat dengan menyediakan lingkungan yang nyaman dan mendukung untuk beribadah dan beraktivitas (Intawanno, et al., 2023). Selain itu, ada juga pandangan bahwa pengelolaan harus dilakukan berdasarkan spiritual dan adat setempat serta pelestarian nilai budaya.

Terkait struktur, terdapat pandangan yang menyarankan bahwa pengelolaan pura sebaiknya dilakukan dalam bentuk tim dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan keahlian (basik) masing-masing. Hal ini dianggap penting agar pengelolaan dapat berjalan lebih efektif dan profesional, serta dapat mencerminkan nilai-nilai luhur seperti Sapta Bayu dalam setiap tindakan. Tempat ibadah bukan hanya tempat ibadah namun juga pusat sosial dan pertukaran budaya tempat pelestarian warisan budaya dan tradisi (Choudhary & Manisha, 2024).

3.2 Bentuk tata kelola dan pertanggungjawaban Pura

Jika dilihat dari persepsi *Pemedek* (umat Hindu yang datang ke pura untuk bersembahyang atau melakukan persembahan atau *maturan*) meskipun pengelolaan pura sudah dinilai cukup baik dan modern dalam beberapa aspek, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi dan pelibatan masyarakat secara lebih merata. Namun sesungguhnya, jika dilihat dari sisi *pengempon* (orang yang bertanggungjawab mengurus pura), manajerial pura memiliki bentuk yang berbeda. Manajerial pura saat ini mengadopsi nilai-nilai manajerial Bali kuno. Terdapat ada dua sistem yang mendasari tatanan pemerintahan dan sosial Bali Kuno, yaitu sistem Kulturan dan sistem Kabayan. Keduanya memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Jika dikaitkan dengan sistem tata kelola dan akuntabilitas pura, keduanya memiliki arah pertanggung jawaban yang berbeda. Pada Desa Kesiman, menggunakan *Bali kuno "Tata Dewa, Tata Keratuan"*, yang didalamnya mengandung nilai sistem pengelolaan pura dilakukan sebagaimana sistem yang berlaku di kerajaan atau Puri. Pada pura di wilayah Kesiman, pengempon pura bertugas bertanggung jawab penuh atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaksanaan upacara di sebuah pura. Ikatan antara pengempon dan pura biasanya didasarkan pada wilayah geografis atau garis keturunan. *Pemaksan* adalah sekelompok masyarakat yang memiliki ikatan dengan sebuah pura berdasarkan fungsi, profesi, atau tujuan khusus yang diemban oleh pura bertanggung jawab dan tugas yang dikelola adalah atas upacara keagamaan atau religi. *Pemaksan* terdiri dari dua, yaitu *pemaksan wed* (pemaksan dari garis keturunan langsung yang bertanggung jawab atas pura) dan *pemaksan tis-tisan* (yang berasal dari luar garis keturunan, bisa berupa menantu atau keturunan diluar kesiman).

Alur tanggung jawab pura di daerah Kesiman, mungkin berbeda dengan Pura khayangan Tiga diluar Kesiman. *Pengempon* tidak memiliki tanggung jawab wajib kepada Masyarakat atau umat atas tata kelola pura. Pertanggungjawaban pengelolaan hanya dilakukan secara internal antar pengurus yang diketuai oleh Mangku Dalem. Hal ini dikarenakan, di Kesiman yang bertanggung jawab membiayai operasional dan menjalankan tugas religi dan sosial adalah *pengempon*. *Pengempon* menerima hak pengelolaan atas *Laba Pura* (berupa aset produktif milik Pura) secara turun temurun yang diberikan oleh pendiri pura atau Puri (Kerajaan). Aset tersebut biasanya berupa tanah dan atau bangunan dengan luas tertentu yang dikelola oleh pengempon untuk mendapatkan manfaat finansial berupa dana pemasukan yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pengelolaan pura, baik itu kegiatan religi atau upacara, sosial, pembangunan dan perbaikan pura. Maka sumber pemasukan utama berasal dari pengelolaan *Laba Pura (berupa aset- bukan laba/keuntungan dalam konteks akuntansi)*. Meskipun umat juga diperkenankan memberikan sumbangan sebagai wujud *yadnya* (persembahan yang tulus ikhlas), penerimaan tersebut merupakan pendapatan lain-lain atau surplus lainnya. Atas penerimaan ini, tidak ada kewajiban untuk membuat laporan keuangan (mandatori). Namun pada beberapa pura biasanya dicantumkan dalam papan

pengumuman atau ditulis pada buku penerimaan. Tetapi tidak diungkapkan sepenuhnya secara lengkap (hanya seadanya, karena banyak penyumbang yang tidak mau nama dan atau nominal sumbangannya dipublikasikan).

Proses pertanggungjawaban yang terjadi di Desa Kesiman dilakukan melalui *sangkep pengepungan* atau musyawarah yang dilakukan di akhir prosesi atau saat terjadinya pemberhentian sesuatu (upacara, pengurus, individu atau lainnya) atau istilah secara umum di Bali disebut dengan *Paruman* (rapat formal dengan tujuan mengambil keputusan penting secara bersama-sama oleh anggota kelompok Masyarakat). Rapat ini hanya melibatkan pengurus internal pura saja tanpa melibatkan Masyarakat atau umat secara luas. Karena dana dan sumber daya yang dikelola pura mayoritas berasal dari hasil pengelolaan pengurus internal. Hierarki tertinggi berada di Mangku Dalem sebagai puncak jabatan tertinggi di pura. Bentuk akuntabilitas (pertanggung jawaban) yang dilakukan lebih menekankan pada akuntabilitas religi dibandingkan tanggung jawab sosial. Sedangkan pada Pura dengan mekanisme berbeda diluar Kesiman, bisa saja menggunakan manajerial seperti yang digunakan dalam bentuk tata kelola Khayangan Tiga. Sumber pendanaannya berasal dari Desa Adat, yang juga berarti dari Masyarakat Desa Adat. Maka atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan *pengempon* berkewajiban menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Masyarakat adat. Laporan yang disusun belum memiliki pedoman baku, atau mengacu pada standar akuntansi keuangan. Setiap pura memiliki format tersendiri menyesuaikan dengan kepentingan dan kebijakan yang berlaku di pura tersebut. Maka hasilnya tidak bisa di komparasi antar satu dan yang lainnya. Namun secara garis besar laporan yang dibuat hampir serupa dengan laporan arus kas, yang berisi arus uang masuk dan arus uang keluar. Hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saat terjadi transaksi (cash basis) (Wardani, dkk., 2024). Tidak ada laporan laba rugi, atau laporan posisi keuangan. Karena tidak semua aset yang dimiliki, dikonversi kedalam satuan moneter. Hanya kas tunai yang dapat diukur secara satuan moneter, aset lainnya diakui dalam bentuk daftar aset namun belum disajikan secara penuh dan terinci. Rapat yang bersifat lebih formal dan mengambil keputusan penting. *Pengempon* menyusun RAB (rencana anggaran biaya) berdasarkan data historis sebelumnya, dan diakhir kegiatan dibuat laporan realisasi anggaran secara sederhana. Akuntabilitas dalam penerimaan dana, pencatatan, transaksi keuangan, dan otorisasi pengeluaran dana memperkuat pengendalian internal (Mensah, 2016). Pada standar akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam ISAK 335 (interpretasi standar akuntansi keuangan). Namun, pada organisasi keagamaan catatan yang dibuat sangat sederhana, karena ketidaksiapan dalam penyusunan, adanya kendala sumberdaya dan pengetahuan akuntansi khususnya ISAK 335 (Wardani, dkk., 2024).

3.3 Akuntabilitas spiritual dan sosial

Model akuntabilitas yang diterapkan di Pura sangat kental dengan nilai tanggung jawab kepada Tuhan, nilai-nilai religi dan doktrin yang tumbuh berkembang di Masyarakat adat. Diperlukan sistem akuntansi yang lebih humanis dan etis, tidak hanya fokus pada angka dan aspek teknis semata, (Dellaportas, 2019). Jika pada pelaksanaannya, terdapat defisit anggaran, maka pengurus akan ber-*yadnya* (berupa dana, tenaga, waktu, sumbangan pemikiran) secara *volunteer*. Atau menggunakan pemasukan lainnya dari Punia umat untuk menutupi deficit yang terjadi. Paruman atau sangkep merupakan bentuk akuntabilitas adat yang kental dengan nilai budaya lokal.

Integrasi nilai spiritual dalam praktik akuntabilitas merefleksi penyeimbangan kehidupan duniawi dan spiritual, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan dan Masyarakat (Dewi, et al., 2024). Kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya kesenjangan informasi di masyarakat umum terkait akuntabilitas pura. Kewajiban transparansi dan akuntabilitas sebuah pura bergantung pada asal sumber dayanya, baik berupa dana maupun aset lainnya. Dengan demikian, tidak semua pura memiliki kewajiban untuk bersikap transparan dan akuntabel kepada publik secara luas. Meskipun demikian jika terdapat akuntabilitas yang tepat dan prosedur pengendalian internal yang baik kepercayaan publik akan lebih meningkat (Mensah, 2016). Akuntabilitas informasi keuangan akan mampu terwujud dengan penerapan standar akuntansi, pencatatan transaksi yang sistematis dan rapi, serta transparansi penyampaian laporan yang dilakukan secara berkala (Shonhadji, dkk., 2024). Laporan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan cara penyampaian secara langsung, maupun melalui media yang sesuai dengan karakter lokal Masyarakat (Muhammad & Sari, 2021).

Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya informasi. Secara umum informan yang mewakili umat Hindu secara umum beropini bahwa terdapat kendala dalam komunikasi antara *pengempon* pura dengan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan. Kurangnya koordinasi antar pengurus juga menjadi masalah. Karena partisipasi umat atau masyarakat dalam pengelolaan pura belum sepenuhnya merata. Padahal sesungguhnya manajerial pura antara satu dan lainnya dipengaruhi oleh adopsi nilai-nilai Bali kuno yang mungkin berbeda. Terdapat pura yang mereplikasi sistem Kulturan, sistem Kabayan, atau kombinasi keduanya. Maka alur akuntabilitas dan keterlibatan Masyarakat akan menjadi berbeda. Masyarakat juga merasa terdapat kendala finansial (keterbatasan dana) dan ketergantungan pada figur tertentu karena kurangnya regenerasi *pengempon* menjadi tantangan nyata. Kemungkinan adanya potensi intervensi politik dapat menyebabkan penggunaan dana dan sumber daya (aset pura) tidak tepat sasaran. Selain itu, tekanan ekonomi, sosial, dan modernisasi juga dapat mengancam kelestarian fungsi sakral pura. Terkadang muncul sikap acuh tak acuh terhadap kebersamaan dan

tanggung jawab, serta adanya kedekatan keluarga dalam kepengurusan yang menyebabkan perbedaan kualitas pengelolaan pura, disamping tidak adanya regulasi baku atas pengelolaan organisasi keagamaan secara umum.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa pengelolaan pura secara umum sudah terkelola dengan baik, khususnya dalam hal perawatan dan pelaksanaan upacara keagamaan. Pengelolaan dianggap sudah sangat baik karena setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu mengikuti hasil kesepakatan bersama Masyarakat (contohnya Pura Khayangan Tiga). Pengelolaan pura saat ini sudah berbasis kuat pada sistem adat dan spiritual, yang menjadi landasan utama dalam menjaganya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pura memiliki sisi yang sudah berjalan dengan baik, terutama dalam aspek adat dan kesepakatan bersama, namun masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi, terutama terkait komunikasi, regenerasi, dan transparansi.

Secara keseluruhan, masukan-masukan yang disampaikan mencerminkan keinginan untuk mencapai pengelolaan pura yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang sudah ada. Berikut adalah poin-poin penting dari masukan tersebut:

1. Peningkatan Komunikasi dan Partisipasi. Banyak responden menyarankan agar komunikasi antara pemangku pura dan masyarakat ditingkatkan. Hal ini termasuk melibatkan krama adat dan generasi muda dalam setiap musyawarah dan pengambilan keputusan. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dianggap krusial untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
2. Tata Kelola Modern dan Profesional. Pengelolaan pura perlu diorganisasi dalam sistem manajemen yang lebih rapi. Ini mencakup beberapa hal, diantaranya transparansi keuangan, yaitu pencatatan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Pengurus pura sebaiknya diberikan pelatihan, diklat, atau sosialisasi mengenai tata kelola dan tanggung jawab agar pura dikelola secara profesional. Serta perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, Dinas Kebudayaan, PHDI, dan MDA untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
3. Nilai Spiritual dan Keterbukaan. Meskipun profesionalisme diperlukan, pengelolaan pura harus tetap berlandaskan pada ketulusan, gotong royong, dan kejujuran. Semua masukan menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai luhur (dharma) sebagai fondasi utama. Pada saat yang sama, pengelolaan harus beradaptasi secara bijak terhadap perubahan zaman.
4. Keterlibatan Pemerintah, beberapa masukan juga menyoroti perlunya pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak berwenang untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.

Masukan dari masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan untuk memadukan manajemen modern dengan nilai-nilai spiritual dan budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan pura dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Relevansi Nilai Sapta Bayu dalam Pengelolaan Pura secara umum, mayoritas responden sepakat bahwa nilai-nilai Sapta Bayu sangat relevan dan ideal untuk diterapkan dalam pengelolaan pura. Nilai-nilai ini dianggap sebagai pedoman penting yang dapat menciptakan tata kelola pura yang lebih baik, jujur, dan berkelanjutan. Responden berpendapat bahwa nilai-nilai Sapta Bayu selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola modern, seperti transparansi dan akuntabilitas. Nilai *bayu jiwa* (kepedulian) dan *bayu sabda* (komunikasi jujur) dapat membangun kepercayaan antara pengurus dan umat, *bayu budhi* (kebijaksanaan) dan *bayu sakti* (kewibawaan) memperkuat kepemimpinan yang adil, sedangkan *bayu dhana* (pengelolaan sumber daya) mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Landasan spiritual dan integritas, nilai-nilai ini juga dianggap sebagai fondasi spiritual yang kuat. *Bayu Yadnya* (pengabdian dan integritas) menjadi landasan utama yang mendorong pengurus untuk bekerja dengan tulus ikhlas, bukan mencari imbalan. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Tri Kaya Parisudha (berpikir, berkata, dan berbuat baik) dan semangat dharma. Namun meskipun dianggap relevan, beberapa responden menyadari adanya tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah masih adanya pengelola pura yang kurang memiliki integritas dan kejujuran, bahkan meminta imbalan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ini secara konsisten sangat penting untuk memastikan pengelolaan pura berjalan dengan baik dan dipercaya oleh masyarakat. Memahami aspek manusia memiliki andil penting pada pengambilan keputusan. Karena informasi ekonomi tidak selalu bersifat keyangan, informasi yang sesungguhnya akan memberikan makna informasi yang lebih banyak untuk pengambilan Keputusan (Badu, 2020).

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Sapta Bayu dianggap dapat menjadikan pura sebagai pusat spiritual yang relevan, bersih, dan memberdayakan, serta menjaga kelestarian pura sebagai warisan budaya dan tempat ibadah yang berharga. Namun, berbeda dengan organisasi nirlaba secara umum, Pura tumbuh berkembang dimasyarakat berdasarkan doktrin dan nilai-nilai agama dan religi yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan cara hidup Masyarakat sekitar pura. Antara satu dan yang lainnya berbeda, tidak ada standar baku, tidak dapat dikomparasi. Bentuk akuntabilitas di Pura tidak hanya sebatas angka akuntansi. Namun angka tersebut membawa pengaruh terhadap hubungan sosial individu di lingkungan pura. Akuntabilitas pura tidak terbatas pada tanggung jawab keuangan dan sosial namun juga tanggung jawab kepada Tuhan.

4. SIMPULAN

Berikut ini merupakan Kesimpulan dari hasil penelitian. Terdapat dua jawaban penelitian utama, sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan:

1. Secara umum, masyarakat Hindu di Bali (sebagai *pemedek*) menilai bahwa pengelolaan pura sudah cukup baik, terutama dalam hal perawatan fisik dan pelaksanaan upacara keagamaan. Namun, mereka juga menyadari adanya beberapa tantangan, seperti kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Terdapat kesenjangan informasi antara pengelola pura (*pengempon*) dan masyarakat umum, yang dapat memengaruhi kepercayaan publik. Nemun ternyata terdapat dua sistem pengelolaan yang berbeda. Tanggung jawab dan alur akuntabilitas pengelolaan pura sangat bergantung pada sistem yang diterapkan. Ada dua sistem tata kelola yang tersirat dalam hasil jawaban responden yaitu:
 - a) Sistem Pura di Desa Kesiman: Pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengempon (berdasarkan garis keturunan atau wilayah). Pendanaan utama berasal dari pengelolaan Laba Pura (aset produktif milik pura) secara turun-temurun. Dalam sistem ini, pertanggungjawaban pengelolaan bersifat internal dan ditujukan kepada Tuhan (akuntabilitas religi), bukan kepada masyarakat luas. Rapat atau paruman hanya melibatkan pengurus internal.
 - b) Sistem Pura Khayangan Tiga: Pendanaan berasal dari Desa Adat, yang berarti dananya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelola bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada masyarakat adat (akuntabilitas sosial). Laporan ini umumnya berupa laporan arus kas sederhana.

Tetapi secara umum *good governance* akan sangat bergantung pada partisipasi dan keadilan. Masyarakat akan aktif terlibat jika merasa suara dan kontribusi mereka dihargai. Hal ini terwujud melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan dan pembagian tugas yang adil sesuai nilai Dharma. Efektivitas dalam pengelolaan pura tidak hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga spiritual. persepsi masyarakat terhadap *good governance* di pura sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan spiritual, di mana unsur kejujuran, keadilan, partisipasi, dan efektivitas dalam menjalankan tugas suci menjadi indikator utama.

2. Persepsi masyarakat Bali terhadap implementasi Nilai Sapta Bayu sebagai katalitaor *good governance* sangat erat kaitannya dengan bagaimana nilai-nilai tersebut terwujud dalam tindakan nyata dan praktik sehari-hari pengempon pura. Persepsi ini bersifat kualitatif dan holistik, tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dalam pengelolaan Pura mengarah adanya kebutuhan akan integrasi manajemen modern dan nilai lokal. Meskipun sistem pengelolaan pura sangat kental dengan nilai-nilai adat dan spiritual, ada dorongan kuat dari masyarakat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen modern, seperti profesionalisme dan transparansi. Pengelolaan pura harus tetap berlandaskan pada semangat gotong royong, musyawarah (*sangkep*), dan nilai-nilai luhur seperti Sapta Bayu. Nilai-nilai ini dianggap relevan untuk menciptakan tata kelola yang jujur, adil, dan berintegritas. Nilai-nilai budaya dan adat setempat sangat penting. Masyarakat merasa perlunya inovasi, terdapat usulan untuk meningkatkan komunikasi, melatih para pengurus, serta membuat pencatatan keuangan yang lebih transparan dan mudah diakses. Namun, tantangannya adalah tidak adanya standar akuntansi baku, sehingga setiap pura memiliki format laporan yang berbeda.

Secara ringkas, pengelolaan pura di Bali memiliki dua sisi yang saling beririsan, di satu sisi, ia berhasil menjaga nilai-nilai adat dan spiritual yang kuat; di sisi lain, ia menghadapi tantangan modernisasi yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih baik. Kewajiban-kewajiban ini, bagaimanapun, bervariasi tergantung pada sumber daya dan sistem adat yang mendasari setiap pura. Jika nilai-nilai sapta bayu dikataliskan kedalam perwujudan *good governance* maka dalam aspek transparansi dan akuntabilitas nilai Satya (Kejujuran) akan menjadi fondasi transparansi. Implementasinya dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara internal pengurus dan atau kepada Masyarakat umum. Nilai Dharma (Kebenaran) sebagai landasan bahwa setiap tindakan berdasarkan

kebenaran dan keadilan, bukan kepentingan pribadi, sebagai wujud akuntabilitas moral yang tinggi. Nilai Mitra (Kemitraan) diwujudkan melalui musyawarah. Pengempon pura yang baik tidak membuat keputusan sepihak, melainkan merangkul aspirasi dan kontribusi dari seluruh umat. Nilai Artha (Ekonomi), tidak hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya secara adil. Implementasinya adalah alokasi dana pura yang merata untuk upacara dan pemeliharaan, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dana demi keuntungan pribadi.

Studi ini membuktikan bahwa *good governance* yang efektif adalah perpaduan unik antara efisiensi manajerial dan pemeliharaan nilai-nilai spiritual dan sosial. Ini memberikan peta jalan bagi organisasi keagamaan atau komunitas lain untuk berkembang dan tetap relevan di tengah tuntutan modernisasi. Serta memberikan gambaran tentang bagaimana organisasi berbasis nilai tradisional dapat beradaptasi dengan tuntutan manajemen modern tanpa kehilangan identitasnya. Pengelolaan pura di Bali menunjukkan bahwa konsep *good governance* tidak harus meniru model modern sepenuhnya, tetapi bisa diinternalisasi melalui nilai-nilai lokal dan spiritual seperti Sapta Bayu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Putu Agus., I Ketut Sujana., Sang Ayu Putu Dinda Natalia., Kadek Dwi Linda Yanthi. (2025). Tri Hita Karana: Balinese local wisdom and its role in the triumph over corruption. *Journal of Accounting & Organizational Change*. DOI: [10.1108/JAOC-11-2023-0182](https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2023-0182)
- Arsani, Ni Kade Adi Juli., Nengah Bawa Atmadja., Nyoman Miarta Putra. (2025). Manajemen Pemangku Pada Pura Agung Jagatnatha Di Kabupaten Buleleng, Bali. *Widya Dana: Jurnal Penelitian Ilmu Agama Dan Kebudayaan*. Vol.3 No.1
- Badu, Ronald. S. (2020). Konstruksi Akuntansi Sosial dan Lingkungan Melalui Metafora Sidiq, Amanah, Tabligh dan Fatonah. *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. Vol. 5(1):47. DOI: 10.37905/aksara.5.1.47-52.2019
- Barnard, C. I. (1938). *The Functions of the Executive*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4000/assr.3386>.
- Bell, Jeanne., Shannon Ellis. 2016. *Financial Leadership in Nonprofit Organizations*. Wiley- The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management, Fourth Edition. doi.org/10.1002/9781119176558.ch17. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119176558.ch17>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Darmawan, Deni. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- D'Ars , De Bremond., Nicolas. (2006). Catholics and money: An approach to the parish through its finances. *Archives de Sciences Sociales des Religions* Volume 133, Issue 1, Pages 67 – 92.
- Fitria, Y. (2017). Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *Akuntabel*, 14(1), 38. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1353>
- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton University Press.
- Ionel, Bostan., Costuleanu, Carmen. (2010). Implications of accounting and tax Regulations in the activity of religious establishments. *European Journal of Science and Theology* Volume 6, Issue 3, Pages 23 – 29.
- Krista, Putu. Polres Gianyar Bongkar Korupsi Dana Hibah Pembangunan Pura Rp 2,25 Miliar. artikel detikbali, dipublikasi pada Sabtu, 23 November 2024. Disitasi pada laman <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7652967/polres-gianyar-bongkar-korupsi-dana-hibah-pembangunan-pura-rp-2-25-miliar> , 23 Februari 2025.
- Laughlin, R. (1990). "A Model of Financial Accountability and the Church of England." *Financial Accountability & Management*, 6(2), 93–114.
- Lansing, J. S. (1991). *Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali*. Princeton University Press.
- Manek, Antonius Darwanto., Syamsyul Bahria., Kojanah. (2024). Penerapan Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus di Gereja Kristus Raja Seon Kabupaten Malaka). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*. Volume 1 No. 9, September 2024, 862 – 870. DOI: <https://doi.org/10.62335>
- Manning, Joseph G. (2019). *The Ptolemaic Governmental Branches and the Role of Temples and Elite Groups*. 10.1002/9781118428429.ch7.
- Monier, Williams. (2024). *Tyga Kamus Bahasa Inggris Sansekerta*, Oxford University Press. Disitasi pada tanggal 4 Januari 2024 pada laman https://www-ibiblio-org.translate.goog/sripedia/ebooks/mw/0400/mw_0489.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Penerbit Andi.

- Muhammad, R., & Sari, A. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79-94.
- Mulgan, R. (2000). "Accountability: An Ever-Expanding Concept." *Public Administration*, 78(3), 555–573.
- Novi. [Hibah Rp 2,2 Miliar Pura di Desa Adat Majangan, Polres Gianyar Ungkap Laporan Fiktif](https://www.nusabali.com/berita/180746/hibah-rp-22-miliar-pura-di-desa-adat-majangan-polres-gianyar-ungkap-laporan-fiktif) . Artikel Nusa Bali, dipublikasi pada 23 November 2024. Disitasi pada laman <https://www.nusabali.com/berita/180746/hibah-rp-22-miliar-pura-di-desa-adat-majangan-polres-gianyar-ungkap-laporan-fiktif>, 23 Februari 2025.
- Nurdin, Choiriah Muslimah., Agusdiwana Suarni., Nasrullah. (2024). Model Pengelolaan Keuangan Masjid : Peluang Dan Hambatan (Studi Pada Masjid Muhammadiyah Di Kabupaten Gowa). *Journal of Aswaja and Islamic Economics (JASIE)*. Vol.3 No.1 (2024).
- Raka, Anak Agung Gede., I Wayan Parwata., I Wayan Runa., Anak Agung Rai Sita Laksmi., I Dewa Putu Sumantara. (2018). *Sapta Bayu Spirit Sri Ksari Warmadewa*. Warmadewa University Press. Denpasar. 2018
- Ravichandran, N., S. Venkataramanaiah, Uday Gajiwala., Rahul Pandey., Shridhar Venkat., I. V. Subba., Rao., K. R. S. Murthy., S. Manikutty., G. Raghuram. (2024). Managing Social Organizations: Experiences and Challenges. *The Journal for Decision Makers* 49(1) 83- –109. DOI: 10.1177/02560909241239517. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/02560909241239517>
- Sharma, C. (1994). *A Critical Survey of Indian Philosophy*. Motilal Banarsidass.
- Sinaga, S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik*. Salemba Empat.
- Shonhadji, N., Yulianti, E., Samekto, A., Nasution, Z., & Djunaedi, A. Z. (2024). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Menuju Akuntabilitas dan Transparansi. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(1), 32 - 41. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v4i1.97>
- Politika, Bali. Hibah Pura Dalem Desa Adat Tiyingan diduga diKorupsi 1,6 Milyar RAB 6,1 milyar, banyak item proyek tak digarap. Artikel Bali Politika, dipublikasi pada Jumat, 22 November 2024. Disitasi pada laman <https://balipolitika.com/2024/11/22/hibah-pura-dalem-desa-adat-tiyingan-diduga-dikorupsi-16-miliar/> 23 Februari 2025.
- Putri,Putu Yudha Asteria. (2021). Formation Character Based On Philosophy Of Sapta Bayu: Spirit Sri Kesari Warmadewa. [DOI: 10.38142/ijess.v2i1.66](https://doi.org/10.38142/ijess.v2i1.66)
- Wardani, R., Tripalupi, R. I. ., & Effendi, R. . (2024). Analisis Kesiapan Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 di Organisasi Keagamaan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Pusat - Cimahi. *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 2(2), 343–358. Retrieved From <https://Jurnal.Academiacenter.Org/Index.Php/IJEN/Article/View/347>
- Widasari, Kadek Indah. I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. (2018). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. [DOI: 10.24843/EJA.2018.v22.i02.p18](https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p18)
- Widasari, Ihsanul. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. 2024. *Hasina Jurnal Akuntansi dan Bisnis Sariah*. Vol.1 No.1 (2024); Edisi 1.
- Zakaria, Boulanouar., Grassa, Rihab., Alqahtani, Faisal. (2024). The dynamic interplay of Shariah compliance rank and financial performance: nonfinancial listed firms in Saudi Arabia as a testing ground. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. 10.1108/JFRA-07-2023-0405.